

Pengaruh Pemerintah Terhadap Keseimbangan Pendapatan Nasional Provinsi DKI Jakarta

Nabila Aprilia¹, Dedek Kustiawati^{2*}, Haidar Ali³, Fitri Rama Dini Nasution⁴

^{1,2,3,4} Pendidikan Matematika FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email : nabila.aprilia20@mhs.uinjkt.ac.id¹, dedek.kustiawati@uinjkt.ac.id^{2*},
Haidar.ali20@mhs.uinjkt.ac.id³, fitri.nasution20@mhs.uinjkt.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode studi kepustakaan atau library research. Data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta yang menganalisis keseimbangan pendapatan nasional di DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, terdapat pembahasan mengenai pendapatan nasional provinsi DKI Jakarta tahun 2020 dan pendapatan nasional provinsi DKI Jakarta tahun 2021 yang menunjukkan berdasarkan data statistika yang didapat dari BPS dapat menentukan Pendapatan Nasional DKI Jakarta tahun 2020 memperoleh sekitar 1.840.667,72 (dalam milyar). Di tahun 2021 lebih banyak pengeluarannya dibanding dengan data statistik BPS tahun 2020, Sehingga Pendapatan Nasional DKI Jakarta tahun 2021, memperoleh sekitar 1.906.276,03 (dalam milyar). Hal ini dapat dibuktikan melalui grafik fungsi keseimbangan pendapatan nasional tahun 2020 dan 2021 provinsi DKI Jakarta di tahun 2020-2021 diperoleh pendapatan nasional yang berbeda. Tahun 2021 pendapatan nasional metode pengeluaran yang diperoleh lebih banyak dibanding pada tahun 2020. Terjadi peningkatan pendapatan nasional di tahun 2020 ke 2021.

Kata Kunci: *Keseimbangan, Pendapatan Nasional, DKI Jakarta*

Abstract

This research is a type of research that uses library research methods. Data obtained through the Central Bureau of Statistics of DKI Jakarta Province which analyzes the balance of national income in DKI Jakarta. In this study, there is a discussion on the national income of the DKI Jakarta province in 2020 and the national income of the DKI Jakarta province in 2021 which shows that based on statistical data obtained from BPS, it is possible to determine the National Income of DKI Jakarta in 2020 to get around 1,840,667.72 (in billions). . In 2021, the expenditure will be more than the BPS statistical data in 2020, so that the National Revenue of DKI Jakarta in 2021, will get around 1,906,276.03 (in billion). This can be proven through the graph of the national income balance function in 2020 and 2021 for the DKI Jakarta province in 2020-2021, different national incomes are obtained. In 2021 the national income of the expenditure method obtained is more than in 2020. There is an increase in national income from 2020 to 2021.

Keywords: *Balance, National Income, DKI Jakarta*

PENDAHULUAN

Matematika ekonomi merupakan salah satu ilmu matematika terapan yang menggunakan analisis matematis untuk memecahkan masalah ekonomi seperti biaya, harga, upah tenaga kerja, permintaan dan penawaran, penghasilan dan laba, produksi dan sebagainya untuk mendapatkan kesimpulan dan keputusan yang terbaik (Mesra, 2016). Dalam banyak hal, konsep dasar ekonomi hanya diekspresikan dalam bentuk matematika sederhana. Namun seiring berkembangnya kehidupan manusia, maka aktivitas ekonomi yang dilakukan semakin kompleks dan makin saling terikat dengan aktivitas lainnya, sehingga membutuhkan pemecahan yang kompleks juga. Secara umum, semakin kompleks masalah, semakin kompleks alat analisis yang digunakan untuk menyelesaikannya. Salah satu alat yang selama ini di anggap mampu mengekspresikan kekompleksan permasalahan tersebut adalah model matematika. Mentransformasikan model ekonomi kedalam model matematika, memungkinkan terjadinya peralihan tingkat kesulitan pemecahan masalah ekonomi ke dalam pemecahan masalah matematika. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang beberapa konsep matematika sebagai syarat pemecahan masalah matematika, sehingga perlu dipelajari oleh ekonom.

Pada dasarnya besar kecilnya pendapatan nasional tergantung pada kemampuan masyarakat suatu negara terutama dalam bidang perekonomian. Semakin tinggi tingkat kemampuan ekonomi masyarakat suatu negara, semakin tinggi pula pendapatan nasional negara tersebut. Sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan perekonomian masyarakat di suatu negara, semakin rendah pula pendapatan nasional negara tersebut. Pendapatan nasional merupakan acuan, tolak ukur atau faktor yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Suatu negara yang menginginkan kemajuan perekonomiannya, maka dapat dilakukan dengan cara meningkatkan taraf hidup dan kelayakan hidup, yang sebenarnya itu tidak lepas dari peran pemerintah. Pendapatan nasional adalah jumlah yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun (Chabibah, 2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Landasan hukum serta tata cara penyusunan APBN terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3. Pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang - undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam perekonomian dua sektor aliran pengeluaran perekonomian terdiri dari dua komponen pengeluaran agregat, yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi. Dalam istilah dari Bahasa Belanda, konsumsi berasal dari kata *consumptie* yaitu segala kegiatan yang dipergunakan dengan tujuan untuk mengambil kegunaan pada suatu produk dan jasa. Sedangkan dari Bahasa Inggris, konsumsi berasal dari kata *consumption* yang berarti pemakaian, menggunakan, pemanfaatan, dan atau pengeluaran. Jika dijabarkan kedalam penjelasan ekonomi makro, maka konsumsi dapat diartikan sebagai variabel makro ekonomi yang dilambangkan dengan huruf "C" yaitu singkatan dari *consumption*. *Consumption* disini dikategorikan ke dalam klasifikasi konsumen rumah tangga, yaitu pembelanjaan barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau melakukan pembelian berdasarkan pendapatan yang dimiliki atau diperoleh. Ketika kegiatan konsumsi itu tidak menghabiskan seluruh pendapatan yang dihasilkan, maka sisa uang yang dimiliki disebut sebagai tabungan. Keynes memiliki teori konsumsi absolut yang disebut sebagai Teori Konsumsi Keynes (*absolut income hypothesis*). Keynes berpendapat bahwa besarnya konsumsi rumah tangga, tergantung dari pendapatan yang dihasilkan. Perbandingan antara besarnya konsumsi dan pendapatan disebut Keynes sebagai *Marginal Propensity to Consume* (MPC). MPC ini digunakan untuk mengukur bahwa semakin besar pendapatan yang dimiliki, maka

tingkat konsumsi rumah tangga juga tinggi, dan begitu pula sebaliknya.

Metropolitan Jakarta merupakan salah satu Kawasan Metropolitan terbesar di dunia dan merupakan kawasan perkotaan terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 20 juta jiwa pada tahun 2007. Pertumbuhan penduduknya yang pesat serta tingkat kepadatan penduduk yang tinggi menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan serta pembentukan karakteristik perekonomian. Selain itu, perannya sebagai ibukota negara juga menambah daya tarik bagi pendatang serta fungsi dan perannya sebagai kawasan metropolitan menjadikan kawasan ini semakin berkembang dengan pesat. Sejak tahun 1975 sektor perekonomian di kawasan ini telah didominasi oleh sektor sekunder dan tersier (Soegijoko dalam Lo dan Yeung, 1996), yang merupakan kelompok sektor ciri khas perkotaan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau library research. Studi kepustakaan adalah pengumpulan suatu informasi yang relevan dengan data yang diperoleh dari buku, dokumen, laporan penelitian, tesis, jurnal, ensiklopedia, dan berbagai sumber tertulis lainnya (Purwono, 2008). Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder yang berupa hasil penelitian terdahulu dan data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta yang menganalisis keseimbangan pendapatan nasional di DKI Jakarta. Menurut (Sari, M. S., & Zefri, 2019) data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh melalui sebuah buku maupun dari hasil penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional adalah total pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat di suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya satu tahun. Pendapatan nasional ini merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh tinggi rendahnya tingkat kehidupan dalam suatu negara. Tujuan pendapatan nasional yaitu untuk mengetahui tingkat kemajuan dan pertumbuhan yang sudah dicapai suatu negara, untuk mengetahui pendapatan yang dihasilkan rakyat dalam kurun waktu satu tahun.

a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nasional (Setiadi and Hastyorini 2015)

1) Keseluruhan Permintaan dan penawaran (*Aggregate Demand and Aggregate Supply*)

Keseluruhan Permintaan (*aggregate demand*) adalah keseluruhan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai kategori harga. Sedangkan keseluruhan penawaran (*aggregate supply*) adalah keseluruhan penawaran barang dan jasa yang ditawarkan sesuai dengan kategori harga.

2) Konsumsi dan Tabungan

Konsumsi adalah bagian pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, keseluruhan pendapatannya akan habis digunakan untuk konsumsi ($Y = C$), sedangkan bagi masyarakat berpenghasilan tinggi, sebagian pendapatannya akan ditabung ($Y = C + S$). Total pengeluaran untuk memperoleh suatu barang dan jasa dalam perekonomian dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi.

3) Investasi

Investasi adalah semua total pengeluaran yang digunakan dapat menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti modal yang sudah usang dan menambah penyediaan modal yang ada.

b. Jenis-Jenis Pendapatan Nasional (Mulyasari 2020)

1) Produk Domestik Bruto/*Gross Domestic Product* (PDB/GDP)

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa yang diperoleh dari beberapa unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama satu periode.

2) Produk Nasional Bruto/*Gross National Product* (PNB/GNP)

Produk Nasional Bruto (PNB) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri selama 1 periode. Dalam PNB ini, penghasilan factor produksi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri ikut diperhitungkan, sedangkan penghasilan factor produksi orang asing yang berada di dalam negeri tidak ikut diperhitungkan.

Secara sistematis, besar PDB dan PNB suatu negara dapat diketahui dengan persamaan berikut:

$$PNB = PDB + (PFLN - PFDN)$$

Keterangan :

PNB = Produk Nasional Bruto

PDB = Produk Domestik Bruto

PFLN = Pendapatan factor produksi warga negara di luar negeri

PFDN = Pendapatan factor produksi asing di dalam negeri

c. Produk Nasional Neto/*Net National Product* (PNN/NNP)

Produk Nasional Neto (PNN) adalah nilai barang dapat terjadi penyusutan (depresiasi) karena harus mengganti barang modal yang sudah usang atau menambah penyediaan modal. Untuk memperoleh besar PNN, dapat diketahui dengan persamaan berikut.

$$PNN = PNB - Depresiasi$$

d. Pendapatan Nasional Neto/*Net National Income* (PN/NNI)

Pendapatan Nasional Neto (PN/NNI) adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh warga negara sebagai pemilik factor produksi. Produk nasional neto di dapat dari pendapatan nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambahkan dengan subsidi. Pajak tidak langsung dikurangkan karena tidak mencerminkan balas jasa atas factor produksi. Subsidi ditambahkan karena merupakan balas jasa atas factor produksi, tetapi tidak masuk perhitungan produk nasional neto.

$$PN = PNN - Pajak\ tidak\ langsung + subsidi$$

e. Pendapatan Perseorangan/*Personal Income* (PI)

Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Perhitungan pendapatan perseorangan dapat diketahui dengan persamaan berikut.

$$PI = (PN + Transfer\ payment) - (Laba\ Ditahan + Iuran\ Asuransi + Pajak\ Perseroan + Iuran\ Jaminan\ Sosial)$$

f. Pendapatan Disposabel/*Disposable Income* (DI)

Pendapatan disposable adalah pendapatan yang siap dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa. Besaran pendapatan disposabel dari pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung yang tidak bisa dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penghasilan.

$$DI = PI - Pajak\ Langsung$$

Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

Hasil perhitungan pendapatan nasional tergantung pada metode atau pendekatan yang digunakan. Ada 3 pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

a. Pendekatan Produksi

Dalam pendekatan produksi, perhitungan pendapatan nasional dilakukan dengan menjumlahkan nilai produksi tiap-tiap sector ekonomi atau menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambahan dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan.

Secara sistematis, pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$Y = \{(Q_1P_1) + (Q_2P_2) + \dots + (Q_nP_n)\}$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional

Q = Jumlah barang dan jasa

P = Harga barang dan jasa

1,2,3,...,n = Jenis barang dan jasa

b. Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, perhitungan pendapatan nasional dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat di suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang memiliki factor produksi yang berupa SDA, SDM, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Jika factor produksi tersebut digunakan dalam proses produksi, maka bentuk balas jasa yang diperoleh oleh pemilik factor ekonomi antara lain:

- a. Balas jasa untuk tenaga kerja berupa upah
- b. Balas jasa untuk modal berupa bunga
- c. Balas jasa untuk kewirausahaan memperoleh laba/keuntungan

Secara sistematis, pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = W + R + I + \pi$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional

W = Upah Kerja

R = Sewa tanah

I = Bunga Modal

π = Laba/Keuntungan

c. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan dari semua pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi untuk membeli barang dan jasa selama 1 tahun. Secara sistematis, pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut (Firdaus 2012).

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional

C = Konsumsi Rumah Tangga

I = Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

Pendapatan Nasional (Y) diperoleh berdasarkan metode pengeluaran dapat melakukan perhitungan (Dumairy et al., 2018) yang terdiri dari adanya metode konsumsi rumah tangga (C), metode investasi (I) dan metode pengeluaran pemerintah (G) jika sektor perdagangan luar negeri bersifat terbuka maka adanya ekspor (X) dan impor (M). Hal tersebut akan menentukan keseimbangan pendapatan nasional. Dapat dituliskan dengan sebuah rumus untuk mendapatkan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G$. Dalam rumusan ini tersirat bahwa perekonomian negara bersifat tertutup, tidak ada hubungan ekonomi dengan pihak luar negeri atau negara lain tetapi jika bersifat terbuka lalu terdapat impor dan ekspor maka rumus pendapatan nasional tersebut akan menjadi $Y = C + I + G + (X - M)$.

Keseimbangan pendapatan nasional yang tidak berhubungan ekonomi dengan pihak luar negeri bisa diperoleh dari sebuah provinsi yang dapat dilihat dari badan pusat statistik (BPS) baik dalam konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah dan juga investasi. Sehingga dapat dianalisis provinsi DKI Jakarta dengan mendapatkan hasil dan grafik pendapatan nasional tersebut tahun 2020-2021 dimana tahun tersebut pandemi Covid-19 masih melanda besar di Indonesia sehingga perlu diperiksa pendapatan nasional di provinsi DKI Jakarta sebagai kota perekonomian di Indonesia.

Pendapatan Nasional Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Berdasarkan data statistik yang diperoleh dalam badan pusat statistik (BPS) (Ragandhi, 2012) terdapat adanya investasi penanaman modal dalam negeri, konsumsi rumah tangga yang didapat dari daerah perkotaan & daerah perdesaan dan juga pengeluaran konsumsi pemerintah. Sehingga didapat data tersebut sebagai berikut:

Berdasarkan data statistik dalam BPS terdapat data pengeluaran PDRB (Produk Domestik Regional Brutto), data tersebut menunjukkan pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah dan Net antara ekspor dan impor. Lalu dalam investasi penanaman modal terdapat juga dalam BPS. Sehingga data-data yang didapat dalam statistic BPS tersebut untuk menentukan pendapatan nasional, antara lain:

Konsumsi Rumah Tangga (C) = 1.722.495,50 (dalam milyar rupiah)

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (G) = 412.247,94 (dalam milyar rupiah)

Net antara Ekspor dan Impor (X-M) = -337.030,42 (dalam milyar rupiah)

Investasi Penanaman Modal (I) = 42.954,7 (dalam milyar rupiah)

Sehingga berdasarkan data statistika tersebut yang didapat dari BPS dapat menentukan Pendapatan nasional adalah

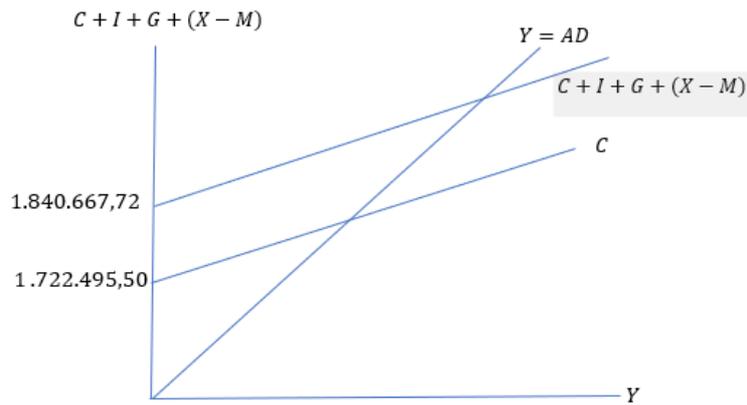
$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$Y = 1.722.495,50 + 42.954,7 + 412.247,94 + (-337.030,42)$$

$$Y = 2.177.698,14 - 337.030,42$$

$$Y = 1.840.667,72 \text{ (dalam milyar)}$$

Sehingga Pendapatan Nasional DKI Jakarta tahun 2020, memperoleh sekitar 1.840.667,72 (dalam milyar).



Gambar 1. Grafik Fungsi Keseimbangan Pendapatan Nasional Tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta

Pendapatan Nasional Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Pembahasannya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, masih berdasarkan kepada data statistik BPS terhadap pengeluaran PDRB, data tersebut terdapat pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah dan juga adanya net antara ekspor dan impor, selain itu adanya investasi penanaman modal yang terdapat dalam data BPS. Sehingga data-data tersebut dapat memperoleh pendapatan nasional berdasar metode pendekatan pengeluaran, antara lain:

Konsumsi Rumah Tangga (C) = 1.808.286,85 (dalam milyar rupiah).

Lalu Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (G) = 456.327,57 (dalam milyar rupiah).

Net antara Ekspor dan Impor (X-M) = -413.046,59 (dalam milyar rupiah).

Investasi Penanaman Modal (I) = 54.708,2 (dalam milyar rupiah).

Keempat data tersebut ditahun 2021 lebih banyak pengeluarannya dibanding dengan data statistik BPS tahun 2020. Oleh karena itu untuk pengecekan pendapatan nasional tersebut bisa dibuktikan dengan rumus metode pengeluaran sifat terbuka yaitu:

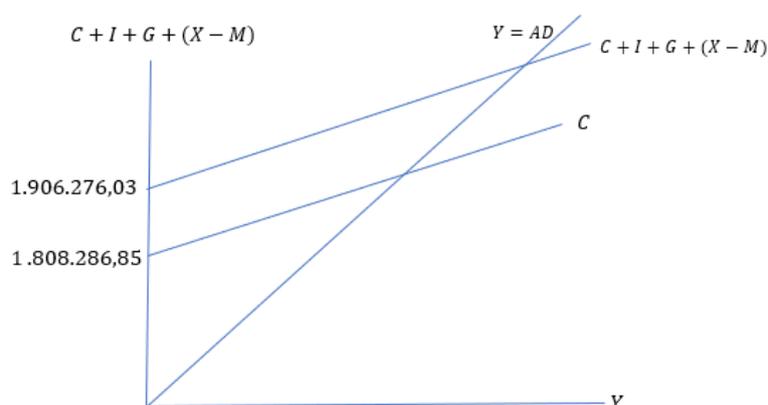
$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$Y = 1.808.286,85 + 54.708,2 + 456.327,57 + (-413.046,59)$$

$$Y = 2.319.322,62 - 413.046,59$$

$$Y = 1.906.276,03 \text{ (dalam milyar)}$$

Sehingga Pendapatan Nasional DKI Jakarta tahun 2021, memperoleh sekitar 1.906.276,03 (dalam milyar).



Gambar 2. Grafik Fungsi Keseimbangan Pendapatan Nasional Tahun 2021 Provinsi DKI Jakarta

Dari kedua data tersebut di tahun 2020-2021 diperoleh pendapatan nasional yang berbeda. Tahun 2021 pendapatan nasional metode pengeluaran yang diperoleh lebih banyak dibanding pada tahun 2020. Terjadi peningkatan pendapatan nasional di tahun 2020 ke 2021.

SIMPULAN

Pendapatan Nasional adalah total pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat di suatu negara dalam periode waktu tertentu yang biasanya satu tahun. Pendapatan nasional ini merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh tinggi rendahnya tingkat kehidupan dalam suatu negara. Berdasarkan data statistik yang diperoleh dalam badan pusat statistik (BPS) terdapat adanya investasi penanaman modal dalam negeri, konsumsi rumah tangga yang didapat dari daerah perkotaan & daerah perdesaan dan juga pengeluaran konsumsi pemerintah. pendapatan nasional provinsi DKI Jakarta tahun 2020 dan pendapatan nasional provinsi DKI Jakarta tahun 2021 yang menunjukkan berdasarkan data statistika yang didapat dari BPS dapat menentukan Pendapatan Nasional DKI Jakarta tahun 2020 memperoleh sekitar 1.840.667,72 (dalam milyar). Di tahun 2021 lebih banyak pengeluarannya dibanding dengan data statistik BPS tahun 2020, Sehingga Pendapatan Nasional DKI Jakarta tahun 2021, memperoleh sekitar 1.906.276,03 (dalam milyar). Hal ini dapat dibuktikan melalui grafik fungsi keseimbangan pendapatan nasional tahun 2020 dan 2021 provinsi DKI Jakarta di tahun 2020-2021 diperoleh pendapatan nasional yang berbeda. Tahun 2021 pendapatan nasional metode pengeluaran yang diperoleh lebih banyak dibanding pada tahun 2020. Terjadi peningkatan pendapatan nasional di tahun 2020 ke 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyasari, Wahyu Rini. 2020. "Ekonomi Kelas XI." *Repositori Kemdikbud* 1: 7–8.
- Setiadi, I.O, and I.R Hastyorini. 2015. *Ekonomi Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial*. Edited by Kartika Sari. Pertama. Klaten: PT Intan Perwira.
- Chabibah. (2021). *Pendapatan Nasional*. Semarang: Mutiara Aksara.
- Mesra. (2016). *Penerapan Ilmu Matematika Dalam Ekonmi dan Bisnis*. Yogyakarta : Deepublish.
- A.Sessu. (2014). *Pengantar Matematika Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mulyawan, Wawan, and Widia Alia. 2020. "APBN Dan Pendapatan Nasional." *Salam Islamic Economics Journal* 1 (2): 59–67.
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/salam/article/view/7929>.
- Vioya, Arrauda. 2010. "Tahapan Perkembangan Kawasan Metropolitan." *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kot* 21 (3): 215–26.
- Fauziana, Lutvi, Anita Mulyaningsih, Eli Anggraeni, Sadi Chaola Y M, and Umi Rofida. 2014. "Keterkaitan Investasi Modal Terhadap Gdp Indonesia." *Economics Development Analysis Journal* 3 (2): 372–80.
- Sari, M. S., & Zefri, M. 2019. "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura." *Jurnal Ekonomi* 21 (3): 308–15.
<https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/608/583>.
- Sudirman, Sudirman, and M Alhudhori. 2018. "Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi." *EKONOMIS : Journal of Economics and Business* 2 (1): 81. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v2i1.33>.
- Depriante, A. J. (2016). Pengaruh Konsumsi dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota

- Padang. 26.
- udo, D. (2019). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di DKI Jakarta Melalui Cukai Kendaraan Bermotor. *Ilmu Manajemen dan Akutansi*, 37-146.
- Effendi, S. (2021). *Tata Kelola Keuangan Negara*. Batam: Batam Publisher.
- Ragandhi, A. (2012). *Pengaruh Pendapatan Nasional, Inflasi dan Suku Bunga Deposito Terhadap Konsumsi Masyarakat Di Indonesia* .
- Firdaus. 2012. "Analisis Pendapatan, Pertumbuhan Dan Struktur Ekonomi Nasional." *Jurnal Plano Madani* 1 (1): 63–73.